

**Policy Paper: Strategi Kebijakan E-Government pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung**

**Atria Dewi**

Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Prov Lampung

email: [Atriadewi1@gmail.com](mailto:Atriadewi1@gmail.com)

(Diterima Maret 2024; Disetujui Maret 2024; Dipublikasikan Maret 2024)

**Abstrak**

*Dampak e-government terhadap penyediaan layanan publik cukup signifikan, karena dapat menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien, yang pada gilirannya mendorong prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan strategis kebijakan e-goverment pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap staf Biro pemerintahan dan otonomi daerah provinsi Lampung dan observasi terhadap website biro terkait. Hasil temuan menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga ahli di bidang IT, tidak ada pelatihan maupun sosialisasi terkait pengelolaan website, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Oleh karena itu perlu adanya system yang strategis guna mewujudkan e-government pada Biro Pemerintah dan otonomi daerah provinsi Lampung. Solusi dan saran yang diberikan adalah perlu adanya sosialisasi, penempatan tenaga ahli IT, perencanaan Panduan system berbasis IT, dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain dukungan dari pemerintah pusat, perlu adanya percepatan realisasi anggaran terkait pelaksanaan e-government guna menciptakan aplikasi yang lebih efektif, efisien, transparan dan inklusif.*

*Kata Kunci : Kebijakan Strategis, SWOT, E-Government*

**Abstract**

*The impact of e-government on the provision of public services is quite significant, because it can produce faster, better and more efficient public services, which in turn promotes the principles of good governance. The aim of this research is to determine strategic e-government policy at the Lampung Province Regional Government and Autonomy Bureau. This research was carried out using qualitative descriptive analysis by conducting interviews with staff from the Lampung provincial government and regional autonomy bureau and observing the relevant bureau's website. The findings show that the main problems faced are the absence of experts in the IT field, no training or outreach regarding website management, as well as inadequate supporting facilities and infrastructure. Therefore, there is a need for a strategic system to realize e-government in Government Bureaus and regional autonomy in Lampung province. The solutions and suggestions given are the need for socialization, placement of IT experts, planning IT-based system guidelines, and completing the necessary facilities and infrastructure. Apart from support from the central government, there is a need to accelerate budget realization related to e-government implementation in order to create applications that are more effective, efficient, transparent and inclusive.*

*Kata Kunci : Determine Strategic, SWOT, E-Government.*

## **PENDAHULUAN**

Reformasi administrasi publik saat ini diarahkan kepada pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi dari manajemen pemerintahan yang didasari pada kebutuhan bagi peningkatan kecepatan, efektivitas dan mutu pelayanan sesuai dengan dinamika kemajuan masyarakat dan tantangan pembangunan. Administrasi publik yang kuat juga memiliki makna kredibilitas dan akuntabilitas di dalam pemecahan berbagai permasalahan pemerintahan yang semakin kompleks secara mendasar dan berkesinambungan, terutama dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara berkeadilan dalam meningkatkan daya saing guna memantapkan diri menghadapi era otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan daerah (Heriyanto 2022).

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government merupakan era baru dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kebijakan serta kegiatan pemerintah baik pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah. Penerapan e-government diharapkan akan membawa dampak positif dalam meningkatkan perekonomian suatu negara seperti negara Indonesia yang sedang berusaha keluar dari status negara berkembang menjadi negara maju (Sipahutar and Sutaryo 2017)

Karakteristik pelayanan publik sebagai berikut: (1) Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya; (2) Memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin di layani; (3) Memiliki tujuan sosial; (4) Dituntut untuk akuntabel kepada publik; (5) Memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan; dan (6) Seringkali menjadi sasaran isu politik (Heriyanto 2022)

Pedoman Pengembangan Infrastruktur Portal Daerah, Pengembangan Pengelolaan Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah, Pedoman Penyusunan Rencana Kelembagaan e-Government, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TIK dalam mendukung e-government, Pedoman Pelaksanaan dari Website Pemerintah Daerah. Kemudian dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2004 meliputi: standar kualitas dan cakupan layanan dan pengembangan aplikasi (eservices), kebijakan kelembagaan, otorisasi, informasi dan partisipasi swasta dalam kebijakan tata kelola yang baik dan manajemen perubahan, pedoman pelaksanaan proyek dan e-budgeting. Cetak baru aplikasi e-government pemerintah, pusat dan daerah. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Komisi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (Detiknas) melalui Keputusan Presiden No. 1. Tanggal 20 Tahun 2006 yang bertanggung jawab untuk percepatan implementasi e-government(Taufik, Sarah, and Yusuf 2022)

E-Government, atau pemerintahan elektronik, merupakan konsep di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan efektif. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, penerapan e-Government di Indonesia terus berkembang dengan berbagai inisiatif, seperti pembangunan portal pelayanan publik, aplikasi berbasis teknologi informasi, dan penggunaan e-Procurement. Meskipun telah mencapai beberapa kemajuan, tantangan seperti aksesibilitas dan literasi digital masih menjadi fokus perhatian. Dengan sumber referensi seperti "Rencana Aksi Nasional e-Government Indonesia 2020-2024" dan "Strategi Nasional e-Government Indonesia," penerapan e-Government diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan efisien(Mahayani 2020). E-government dalam penerapannya biasanya membutuhkan biaya yang besar. Hal ini memungkinkan bahwasanya jika kesejahteraan ekonomi daerah sudah baik, pemerintah akan mempunyai biaya yang cukup dalam pembiayaan untuk melayani

masyarakat melalui implementasi e-government (Sipahutar and Sutaryo 2017)

Banyaknya praktek maladministrasi serta masih lemahnya respon pemerintah pada tiap pelayanan yang ada menjadikan ini sebagai pembenahan implementasi E-government. Tujuan implementasi e-government adalah untuk mewujudkan, menerapkan, transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih selalu mengalami perkembangan dan pembaruan. Persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan e-government tersebut yaitu pertama, pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri dalam inisiatif dan memaknai implementasi e-government. Kedua, kurangnya peraturan, system manajemen, pekerja yang mahir dalam teknologi informasi, serta proses kerja yang tidak memadai. Ketiga, pemerintah masih berfikir bahwa implementasi e- government tidak terlalu penting, dan hanya syarat dalam pelaksanaan saja (Oktaviani and Indra Arza 2020)

Menurut Bank Dunia, *e-government* adalah ketika pemerintah ingin membangun sebuah relasi dengan masyarakat, dunia usaha, serta instansi pemerintah lainnya dengan memakai teknologi informasi yang meliputi *Wide Area Network (WAN) internet, mobile computing*. Sementara menurut Depkominfo, mengartikan *e-government* sebagai sarana pelayanan publik yang menggunakan *website* milik pemerintah dengan domain Pemerintah Indonesia (go.id). Berdasarkan pemikiran Sosiawan (2015), pada konteksnya *e-government* adalah *e-government refers to the processes and structures pertinent to the electronic delivery of government services to the public*. Karena visi tersebut berlandaskan prinsip “dari, oleh dan untuk” masyarakat atau kelompok dimana *e-government* tersebut diimplementasikan, maka masa waktunya akan sangat berpegang pada keadaan dan situasi masyarakat tersebut (Sosiawan 2008). Seperti penjelasan sebelumnya, e-government merupakan sebuah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet supaya lebih efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya *e-government* maka diharapkan tatanan sistem dan kinerja di lingkungan pemerintahan dapat dilakukan melalui teknologi informasi (Dewangga et al. 2022).

Pada pelaksanaan *e-government*, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Akselerasi kecepatan pelayanan berarti juga merupakan penghematan dalam waktu, energi maupun sumber daya (Sosiawan 2008)

Adapun bentuk dari sistem pelayanan informasi publik yang dianggap mudah dan efisien untuk dikembangkan yaitu web, dimana semua sistem informasi yang dipublikan pada web tersebut dapat digunkan sebagai penyedia informasi dan dapat pula digunakan untuk melakukan dialog dengan data, sehingga dapat memberikan sebuah informasi atau pesan dalam pengambilan keputusan tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pembuatan sistem informasi pada umumnya yaitu untuk memberikan kelancaran dalam melakukan administrasi, menghemat biaya maupun waktu, serta mengurangi tenaga yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan Dewangga *et al*, 2022 menghasilkan temuan bahwa untuk menjadikan Jakarta sebagai Smart City, Humas telah membuat portal data yang menyajikan informasi dari Pemprov DKI Jakarta secara bertanggung jawab dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Open data adalah tentang membuat informasi tersedia untuk publik sebanyak mungkin, dan pemerintah ingin memberikan gambaran



Daerah Setda. Provinsi Lampung terhadap implementasi *website* pelayanan *e-government* dengan berdasarkan aspek penilaian Transparansi, Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi Tampilan, dan Update.

Tahap kedua yaitu melakukan analisa terhadap hasil wawancara dengan menggunakan metode analisis SWOT. Setelah melakukan analisis mulai dari tahap satu sampai dua, diharapkan agar menghasilkan suatu identifikasi strategi keberhasilan layanan *e-government* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil observasi pada web pemerintah daerah yaitu :

Tabel 1.

Evaluasi website biro pemerintahan dan otonomi daerah provinsi Lampung

Item Penilaian	Evaluasi
Transparansi	Pada website biro pemerintahan dan otonomi daerah provinsi Lampung tidak terdapat tautan dokumen terkait informasi pengelolaan anggaran
Layanan	Terdapat informasi jenis layanan yang ditangani oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung terdapat alamat email dan call center, namun tidak ada tautan yang mengarahkan pada pelayanan berbasis web. Tidak ada menu panduan untuk mempermudah pelayanan publik.
Efisiensi	Minimnya menu pada <i>website</i> Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung belum memberikan efisiensi dari segi biaya maupun waktu dalam pelaksanaan pelayanan publik dan masih dilakukan secara offline.
Aspirasi	Tidak terdapat menu pelayanan untuk penampungan aspirasi dari masyarakat. Sehingga masyarakat luas tidak dapat menyampaikan keluhan, kritik dan saran secara langsung.
Tampilan	Menurut peneliti tampilan pada <i>website</i> tersebut tidak cukup baik, karena menu yang terdapat pada laman <i>website</i> tidak memiliki menu utama yaitu pelayanan publik, maupun informasi terkait Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung.
Update	Website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung belum melakukan <i>update</i> sejak diluncurkan pada tahun 2018.

Sumber : Data diolah 2024

Pada tabel menunjukkan bahwa *website* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung masih memiliki banyak kekurangan. *Website* masih harus dilakukan *update* terhadap menu utama berupa pelayanan publik ataupun informasi terkait dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung. Perbaikan terhadap *website* perlu

dilakukan secara menyeluruh agar dapat memberikan informasi bagi publik dan memberikan pelayanan publik yang lebih efisien.

Tahap kedua penulis menganalisa masalah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung dengan menggunakan analisis SWOT. Melalui pendekatan strategi SO, strategi ST, strategi WO dan WT.

Tabel 2.  
Analisis SWOT Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung

<b>Kekuatan (S)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat <i>website</i> Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung</li> <li>2. Mempermudah pelaksanaan tugas, efisiensi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan</li> <li>3. Percepatan penyajian informasi/laporan,</li> <li>4. Memperluas sumber informasi dan data</li> <li>5. Dasar pengembangan <i>e-government</i> mengaju pada tupoksi</li> </ol>
<b>Kelemahan (W)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Sistem Informasi pelayanan berbasis elektronik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung</li> <li>2. Belum memiliki staf ahli di bidang IT</li> <li>3. Tidak ada peran tenaga ahli (konsultan) dibidang TI dalam pengembangan dan pengelolaan <i>website</i></li> <li>4. Tidak adanya standar baku/pedoman dalam pengadaan/pengembangan SI/TI</li> <li>5. Kurang komitmen dari manajemen tingkat atas,</li> <li>6. Jaringan Internet yang kurang stabil</li> <li>7. Tampilan <i>website</i> yang masih minim, tidak ada menu pelayanan elektronik dan belum dilakukan <i>update</i></li> <li>8. Pelayanan yang diberikan hanya melalui email dan secara <i>offline</i></li> </ol>
<b>Peluang (O)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebutuhan dalam mendapatkan informasi maupun layanan secara cepat dan efisien.</li> <li>2. Dukungan pemerintah pusat terhadap <i>e-government</i></li> <li>3. Adanya anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung untuk mempercepat pengembangan <i>e-government</i></li> </ol>
<b>Ancaman (T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ancaman terhadap peretasan, pencurian atau pembobolan data.</li> <li>2. Masyarakat yang gagap teknologi merasa kesulitan dalam menggunakan sistem <i>e-government</i> ini. Sehingga berpendapat bahwa sistem manual lebih mudah untuk dilakukan.</li> </ol>

Sumber : wawancara, 2024

Berdasarkan hasil wawancara terhadap staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung maka terdapat permasalahan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan strategis pelayanan *e-government* yaitu :

1. Belum ada Sistem Informasi pelayanan berbasis elektronik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung
2. Belum memiliki staf ahli di bidang IT

3. Tidak ada peran tenaga ahli (konsultan) dibidang TI dalam pengembangan dan pengelolaan *website*
4. Tidak adanya standar baku/pedoman dalam pengadaan/pengembangan SI/TI
5. Kurang komitmen dari manajemen tingkat atas,
6. Jaringan internet yang kurang stabil
7. Tampilan *website* yang masih minim, tidak ada menu pelayanan elektronik dan belum dilakukan *update*
8. Pelayanan yang diberikan hanya melalui email dan secara *offline* sehingga waktu tidak fleksibel dan membutuhkan anggaran.

### **Pembahasan**

Adanya masalah tersebut, maka penulis melakukan analisis SWOT untuk melakukan perencanaan strategis untuk mengatasi permasalahan yang ada. Analisis yang dilakukan adalah analisis strategi kekuatan dan peluang (SO), kekuatan dan ancaman (ST), kelemahan dan peluang (WO), Kelemahan dan Ancaman (WT) sebagai berikut:

Tabel 3.  
Analisis Strategi SWOT Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung

<b>Strategi Kekuatan Peluang (SO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana strategis dengan melakukan optimalisasi pada website Biro pemerintah dan otonomi daerah Provinsi langsung.</li> <li>2. Meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna mencapai efesiensi dan memperluas penyajian informasi</li> <li>3. Mempercepat realisasi anggaran untuk mengembangkan e-government dengan dukungan pemerintah pusat.</li> </ol>
<b>Strategi Kekuatan Ancaman (ST)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sistem keamanan dan menyediakan server yang lebih pada pelayanan <i>e-government</i> agar data pengguna dan pemerintah aman dari pembobolan</li> <li>2. Sosialisasi dan pelatihan mengenai layanan <i>e-government</i> secara penuh terhadap sumber daya manusia yang bertugas agar pengelolaan <i>e-government</i> lebih efektif dan efisien.</li> <li>3. Pelaksanaan e-government dapat mempercepat pelaporan informasi secara transparan melalui <i>website</i> kepada masyarakat luas dan pihak terkait</li> </ol>
<b>Strategi Kelemahan Peluang (WO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan pengelolaan pelayanan <i>e-government</i> dengan cara menempatkan staf ahli IT yang berkualitas pada biro tersebut untuk mengembangkan dan mengelola <i>website</i> dengan optimal.</li> <li>2. Penyusunan panduan dengan baik untuk memudahkan staf maupun masyarakat dalam memahami aturan pelayanan <i>e-government</i>.</li> <li>3. Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana pada kualitas layanan <i>e-government</i> seperti adanya koneksi internet yang stabil.</li> <li>4. Membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien berdasarkan teknologi pada setiap layanan <i>e-government</i>.</li> </ol>

Kelemahan Ancaman (WT)

1. Peran tenaga ahli sangat diperlukan untuk mendesain ulang tampilan layanan *e-government* pada website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung agar lebih mudah dipahami oleh pengguna
2. Melakukan pemantauan terhadap system keamanan *e-government* melalui pemeliharaan server untuk mencegah kehilangan data
3. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap pelayanan *e-government* yang diberikan terhadap masyarakat dan pihak terkait.

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pelayanan *e-government* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung masih harus direncanakan secara menyeluruh. Terdapat banyak kekurangan pada *website* yang telah tersedia sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dibutuhkan tenaga ahli di bidang IT. Oleh karena itu berdasarkan analisis SWOT yang telah penulis lakukan maka saran dan solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana strategis dengan melakukan optimalisasi pada website Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung.
2. Meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna mencapai efisiensi dan memperluas penyajian informasi
3. Mempercepat realisasi anggaran untuk mengembangkan *e-government* dengan dukungan pemerintah pusat.
4. Penguatan sistem keamanan dan menyediakan server yang lebih pada pelayanan *e-government* agar data pengguna dan pemerintah aman dari pembobolan
5. Sosialisasi dan pelatihan mengenai layanan *e government* secara penuh terhadap sumber daya manusia yang bertugas agar pengelolaan *e-government* lebih efektif dan efisien.
6. Pelaksanaan *e-government* dapat mempercepat pelaporan informasi secara transparan melalui *website* kepada masyarakat luas dan pihak terkait
7. Merencanakan pengelolaan pelayanan *e-government* dengan cara menempatkan staf ahli IT yang berkualitas pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung tersebut untuk mengembangkan dan mengelola *website* dengan optimal.
8. Penyusunan panduan dengan baik untuk memudahkan staf maupun masyarakat dalam memahami aturan pelayanan *e-government*.
9. Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana pada kualitas layanan *e-government* seperti adanya koneksi internet yang stabil.
10. Membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien berdasarkan teknologi pada setiap layanan *e-government*.
11. Peran tenaga ahli sangat diperlukan untuk mendesain ulang tampilan layanan *e-government* pada *website* Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung agar lebih mudah dipahami oleh pengguna
12. Melakukan pemantauan terhadap sistem keamanan *e-government* melalui pemeliharaan server untuk mencegah kehilangan data
13. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak terkait terhadap pelayanan *e-government*.

Dengan adanya solusi tersebut maka diharapkan perencanaan strategis *e-government* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan

efektif dan efisien. Pemanfaatan informasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan aplikasi yang lebih efektif, efisien, transparan dan inklusif.

## PENUTUP

Strategi perencanaan *e-government* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung masih mengalami banyak kendala. Meskipun memiliki *website* akan tetapi pengelolaannya masih sangat minim dan dibutuhkan pengembangan yang lebih luas. Selain itu masalah utama yang dihadapi adalah tidak adanya tenaga ahli di bidang IT, tidak ada pelatihan maupun sosialisasi terkait pengelolaan *website*, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Oleh karena itu perlu adanya system yang strategis guna mewujudkan *e-government* pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda. Provinsi Lampung. Solusi dan saran yang diberikan adalah perlu adanya sosialisasi, penempatan tenaga ahli IT, perencanaan panduan sistem berbasis IT dan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah diperlukan terhadap kebutuhan anggaran terkait pelaksanaan *e-government* guna menciptakan aplikasi yang lebih efektif, efisien, transparan dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewangga, Farhan, Prasetya Yoga Santoso, Rialdo Rezeky M. L. Toruan, Dwi Ajeng Widarini, and Ani Kardi Wiyati. 2022. "Program Jakarta Open Data Sebagai E-Government Dalam Pelayanan Informasi Publik Humas Pemprov DKI Jakarta." *Jurnal Cyber PR* 2(1):94–106. doi: 10.32509/cyberpr.v2i1.2129.
- Heriyanto, Heriyanto. 2022. "Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik." *Musamus Journal of Public Administration* 4(2):066–075. doi: 10.35724/mjpa.v4i2.4128.
- Mahayani, Ni Made Hintya. 2020. "GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan." *Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Citra Positif* 7(September):1–9.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Oktaviani, Sonia, and Fefri Indra Arza. 2020. "Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(3):3312–26. doi: 10.24036/jea.v2i3.284.
- Sarjono Sipahutar, Indra, and Sutaryo Sutaryo. 2017. "Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 5(2):17–32.
- Sosiawan, Edwi Arief. 2008. "Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen." *Jurnal Seminar Nasional Informatika* 2008(November 2007):88–98.
- Taufik, Taufik Hidayat, Sarah Wijayanti Sarah, and Yusuf Amrozi Yusuf. 2022. "Analisis Strategi Keberhasilan E-Government Di Kabupaten Bojonegoro." *Journal of Governance Innovation* 4(1):14–26. doi: 10.36636/jogiv.v4i1.1116.